

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2024
KECAMATAN SUNGAI PINANG
KABUPATEN BANJAR**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN	1
A.1 Maksud Laporan	1
A.2 Tujuan Laporan	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI.....	1
B.1 TUGAS POKOK	1
B.2 FUNGSI	1
B.3 DASAR HUKUM.....	2
B.4 STRUKTUR ORGANISASI	3
B.5 KEPEGAWAIAN	4
C. ISU STRATEGIS	4
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA	7
B. PERJANJIAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	9
a. TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2024.....	9
b. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	28
c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET	
PERIODE AKHIR RENSTRA 2021-2026	39
d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET	
NASIONAL	44
e. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN	44
f. ANALISA EFISIENSI	46
g. ANALISA PROGRAM/KEGIATAN	51
h. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT LAPORAN KINERJA TAHUN 2024	51
B. REALISASI ANGGARAN	57
BAB IV PENUTUP.....	76
A. KESIMPULAN	76
B. SARAN-SARAN	76
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pegawai Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024	4
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024.....	8
3Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024.....	9
4Tabel 3. 2 Skala Nilai Perangkat Kinerja.....	10
5Tabel 3. 3 Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	11
6Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya.....	29
7Tabel 3. 5 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Target Periode Akhir Renstra 2021-2026.....	40
8Tabel 3. 6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
9Tabel 3. 7 Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat.....	55
10Tabel 3. 8 Realisasi Jenis Belanja	57
11Tabel 3. 9 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Sungai Pinang	58
12Tabel 3. 10 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	71

DAFTAR GAMBAR

1Gambar 1. 1 SOTK Kecamatan Sungai Pinang.....	3
--	---

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024 ini adalah merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi.

Sebagai salah unsur dari fungsi pelayanan umum dengan tugas pokok pada pemerintahan umum, serta sebagai unsur Pemerintahan Kabupaten Banjar bersama SKPD Teknis untuk mewujudkan pencapaian target-target RPJMD 2021 - 2026, telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Kecamatan Sungai Pinang sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan.

Sungai Pinang, 06 Januari 2025
Camat Sungai Pinang



MARWATA, SE
NIP. 19690217 198903 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar 2021 - 2026 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2024 telah berhasil dicapai.

Analisa terhadap sasaran strategis Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar tahun 2024 menunjukan bahwa capaian pada sasaran strategis masuk pada kategori **Berhasil dengan capaian kinerja 96,67 (125,55%).**

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar yang baik, tepat sasaran dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, sumber daya manusia perencana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

Commented [SP1]: SUDAH

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banjar, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Banjar.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Kecamatan Sungai Pinang berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Banjar dan rincian anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Sungai Pinang adalah seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Sumber Dana	Besar Anggaran (Rp)	Persentase (%)
APBD	Rp. 2.549.505.648,00,-	100%
APBP-P	Rp. 2.631.828.048,00,-	100% + 3,23%

Commented [SP2]: SUDAH

Laporan Realiasi Anggaran Tahun 2024

Commented [SP3]: SUDAH

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	Persentase	REALISASI 2023
BELANJA DAERAH	2.631.828.048,00	2.235.734.954,00	84,95%	1.986.704.264,00
BELANJA OPERASI	2.593.714.048,00	2.199.166.454,00	84,79%	1.889.292.264,00
Belanja Pegawai	1.851.346.128,00	1.563.891.078,00	84,47%	1.358.830.849,00
Belanja Barang dan Jasa	742.367.920,00	635.275.376,00	85,57%	530.461.415,00
BELANJA MODAL	38.114.000,00	36.568.500,00	95,95%	97.412.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.114.000,00	36.568.500,00	95,95%	28.047.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00%	69.365.000,00
	(2.631.828.048,00)	(2.235.734.954,00)	84,95%	(1.986.704.264,00)

BAB I

PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Kecamatan Sungai Pinang;
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Kecamatan Sungai Pinang;
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan;
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Kecamatan Sungai Pinang kepada Bupati;
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Kecamatan Sungai Pinang;
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Sungai Pinang.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

B.1 TUGAS POKOK

Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mempunyai tugas yaitu *"Menangani Sebagian Unsur Otonomi Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Di Wilayah Kecamatan Tertentu"*.

B.2 FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas. Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan diwilayahnya;
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- c. Pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pembinaan kesejahteraan sosial;
- e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

B.3 DASAR HUKUM

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian

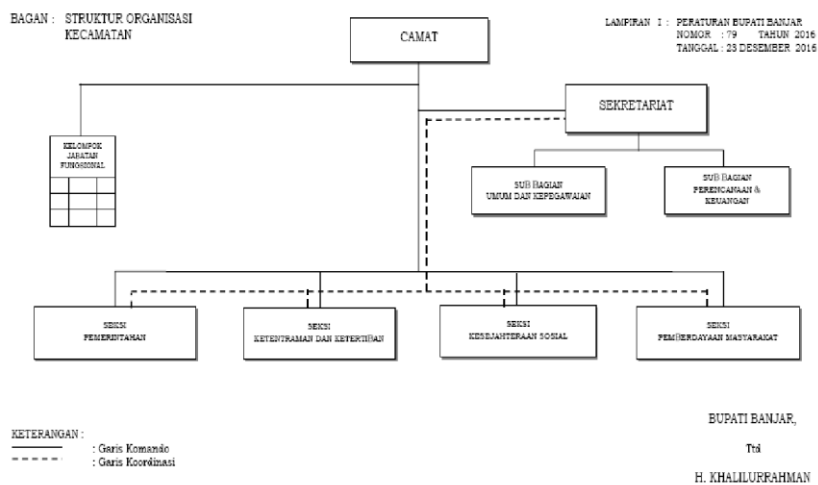
- Tugas Kecamatan dan Kelurahan ; dan
- Peraturan Bupati Banjar Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

B.4 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar terdiri dari:

- Camat.
- Sekretaris Kecamatan, yang terdiri dari :
 - Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
- Kepala Seksi Pemerintahan
- Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
- Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- Kelompok Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:



1Gambar 1. 1 SOTK Kecamatan Sungai Pinang

B.5 KEPEGAWAIAN

Dalam menunjang tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024, Kecamatan memiliki Sumber daya Manusia atau kepegawaian sebanyak 9 orang ASN dan 7 orang Tenaga Honorer dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Pegawai Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024

NO	NAMA PEGAWAI TEMPAT TGL. LAHIR	STATUS	JENIS KELAMIN	ESELON NAMA JABATAN TMT JABATAN **
1.	MARWATA, SE SLEMAN, 17-02-1969	PNS	L	Eselon III a CAMAT 10-10-2023
2.	SALAHUDIN YUSUP, SH AMUNTAI, 17-08-1972	PNS	L	Eselon III b SKRETARIS KECAMATAN
3.	H. ABDUL BAIS, S.Pd BANJAR, 05-08-1967	PNS	L	Eselon. IV.a KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TMT. 31-12-2021
4.	H. RUSMANI BANJAR, 17-01-1967	PNS	L	Eselon. IV.a KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN TMT. 31-12-2021
5.	DARKUNI, SE SUNGAI ALAT, 01-01-1970	PNS	L	Eselon. IV.a KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TMT. 12-02-2024
6.	MULKAN, S.AP BANJAR, 05-08-1974	PNS	L	Eselon. IV b KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN TMT. 12-02-2024
7.	M. ERWIN APRIYANDI, A.Md KANDANGAN, 11-04-1981	PNS	L	Eselon. IV b KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASET TMT. 12-02-2024
8.	SALADERI SUNGAI PINANG, 17-01-1968	PNS	L	Eselon. --- PENGEMUDI 13-04-2024
9.	GUSTI M RIFANI,SE KAB. BANJAR, 03-08-1993	PPPK	L	PERENCANA AHLI PERTAMA 07-03-2024
10	ADHO ATMA PANGARONA, SE PENGARON, 22-03-1990	Non- PNS	L	PENGOLAH DATA DAN IFORMASI 01-01-2012
11	RIDHA ELYDA, S.Pd SUNGKAI, 15 Mei 1990	Non- PNS	P	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 04-01-2022
12	DANA SAPUTRI, S.Psi RANTAU NANGKA, 22-19-1995	Non- PNS	P	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 07-01-2020
13	SARI, S.AP BANJAR, 14-02-1994	Non- PNS	P	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 01-01-2013
14	ZAINATUN HASANAH, S.AP RANTAU NANGKA, 26-06-1996	Non- PNS	P	PENGOLAH DATA DAN INFORMAS 04-01-2015
15	KARYADI SEMARANG, 01-06-1978	Non- PNS	L	PETUGAS KEBERSIHAN 10-01-2010
16	FAHRIADI BANJAR, 08-07-1997	Non- PNS	L	PETUGAS KEAMANAN 02-01-2020

C. ISU STRATEGIS

Kecamatan Sungai Pinang secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Kecamatan Sungai Pinang sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok Pelayanan, memiliki peran yang

sangat penting didalam merumuskan kebijakan Pemerintahan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam Pemerintahan.

Sebelum menentukan isu dilakukan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa pohon masalah yang selanjutnya diltampilkan dalam bentuk matriks pemetaan masalah utama, masalah dan akar masalah. Isu srategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (*Unresolved Matters*) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada **Permendagri 86 Tahun 2017**, kesepakatan melalui FGD atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Kecamatan Sungai Pinang adalah Pelaksanaan Pelayanan Paten masih belum maksimal.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

- **KATA PENGANTAR;**
- **DAFTAR ISI;**
- **RINGKASAN EKSEKUTIF;**

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

- **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKjIP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), serta isu strategis organisasi;

- **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA**

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024.

- **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024**

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2024 dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 beserta analisisnya

- **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan dan Saran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Kecamatan Sungai Pinang mengampu Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Berdasar urusan dan program yang diampu, Kecamatan Sungai Pinang mendukung pencapaian misi keempat Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD yaitu :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah”

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan maupun subkegiatan Kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : “Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik”.

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar menetapkan sasaran yaitu : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan.

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar No. 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan)	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik / Sangat Tinggi)	Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten

Sumber : Surat Keputusan IKU Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024 mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2021-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2024 meliputi sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

3Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	SATUAN	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.	77	Nilai		2.631.828.048,00	CAMAT
Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan Umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	$IKKI = \sum (\text{Unsur kinerja utama} \times 40\%) + (\text{Unsur kepatuhan} \times 30\%) + (\text{Unsur Pelayanan Umum} \times 30\%)$	76	Nilai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.344.088.048,00	SEKRETARIS KECAMATAN
Terlaksananya Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penggangan dan Evaluasi SKPD	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.039.600,00	KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	354.800,00	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000,00	

Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	120.000,00
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000,00
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	835.000,00
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	829.800,00
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	900.000,00
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.843.220.928,00
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang/bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.811.216.128,00
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.130.000,00
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	874.800,00

Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.648.800,00	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	648.800,00	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.000.000,00	
Tersusunnya Administrasi Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.770.000,00	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	Dokumen	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	770.000,00	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Orang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	
Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.175.800,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	749.500,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.750.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.163.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25	Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.500.000,00	

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.763.300,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.250.000,00
Tersedianya Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.114.000,00
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.114.000,00
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.028.920,00
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.750.000,00
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.318.920,00
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.960.000,00
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.010.000,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.980.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.050.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.980.000,00

Terselenggaranya Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang Terlaksana	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26.704.400,00	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
Tercapainya Persentase Pelayanan Paten	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.503.400,00	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.503.400,00	
Tercapainya Persentase Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Presentase Koordinasi Kegiatan Kessos Yang Dilaksanakan	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	23.201.000,00	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7	Laporan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	23.201.000,00	
Tercapainya Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	44.723.500,00	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Tercapainya Persentase Desa dan Kelurahan yang Melaksanakan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan yang Tepat Waktu	Peresntase Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	44.723.500,00	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	11	Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.038.500,00	

	Perencanaan Pembangunan di Desa	Perencanaan Pembangunan di Desa					
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.685.000,00	
Tercapainya Fasilitas Penanganan ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	53.654.900,00	KASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
Tercapainya fasilitas Penanganan Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	48.881.900,00	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40.524.900,00	
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	Laporan	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8.357.000,00	
Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang terfasilitasi	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.773.000,00	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1	Laporan	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.773.000,00	

Kepolisian Negara Republik Indonesia	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	151.339.500,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	151.339.500,00	
Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40	Orang	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	59.128.500,00	
Meningkatnya Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2	Dokumen	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	92.211.000,00	
Tercapainya fasilitas Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.397.700,00	
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Fasilitas	Realisasi / Rencana X 100%	100	Persen	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan	11.397.700,00	KASI PEMERINTAHAN

	Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana				dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	Dokumen	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.900.000,00
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.848.000,00
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.200.000,00
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.749.700,00
Terlaksananya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Dokumen	Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.700.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

a. TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2024

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2024.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus:

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100\%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana})) \times 100\%$$

Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan

sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel berikut.

4Tabel 3. 2 Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \% \leq 100 \%$	Sangat Tinggi
2	$76 \% \leq 90 \%$	Tinggi
3	$66 \% \leq 75 \%$	Sedang
4	$51 \% \leq 65 \%$	Rendah
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :

5Tabel 3. 3 Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	77	Nilai	96,67	125,55%	Sangat Tinggi
	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan Umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	76	Nilai	77,32	101,74%	Sangat Tinggi
1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
1.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	6	100,00%	Sangat Tinggi
1.1.2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	100,00%	Sangat Tinggi
1.1.3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	100,00%	Sangat Tinggi
1.1.4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	100,00%	Sangat Tinggi
1.1.5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	100,00%	Sangat Tinggi
1.1.6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	4	100,00%	Sangat Tinggi
1.1.7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	2	100,00%	Sangat Tinggi
1.2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang/bulan	14	100,00%	Sangat Tinggi
1.2.3	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	12	100,00%	Sangat Tinggi
1.2.5	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	100,00%	Sangat Tinggi
1.3	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi

1.3.5	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	100,00%	Sangat Tinggi
1.3.6	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	4	100,00%	Sangat Tinggi
1.5	Tersusunnya Administrasi Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
1.5.5	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	Dokumen	2	100,00%	Sangat Tinggi
1.5.11	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Orang	1	100,00%	Sangat Tinggi
1.6	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
1.6.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	5	100,00%	Sangat Tinggi
1.6.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	100,00%	Sangat Tinggi
1.6.3	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	Paket	10	100,00%	Sangat Tinggi
1.6.4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25	Paket	25	100,00%	Sangat Tinggi
1.6.5	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	3	100,00%	Sangat Tinggi
1.6.9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	100,00%	Sangat Tinggi
1.7	Tersedianya Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
1.7.6	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	2	100,00%	Sangat Tinggi
1.8	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
1.8.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	100,00%	Sangat Tinggi
1.8.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	100,00%	Sangat Tinggi
1.8.4	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1	100,00%	Sangat Tinggi
1.9	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
1.9.2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	12	100,00%	Sangat Tinggi

1.9.6	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	1	100,00%	Sangat Tinggi
1.9.9	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	100,00%	Sangat Tinggi
2	Terselenggaranya Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang Terlaksana	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
2.2	Tercapainya Persentase Pelayanan Paten	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
2.2.3	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	2	100,00%	Sangat Tinggi
2.4	Tercapainya Persentase Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Persentase Koordinasi Kegiatan Kessos yang Dilaksanakan	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
2.4.3	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7	Laporan	7	100,00%	Sangat Tinggi
3	Tercapainya Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
3.1	Tercapainya Persentase Desa dan Kelurahan yang Melaksanakan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan yang Tepat Waktu	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
3.1.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11	Lembaga Kemasyarakatan	11	100,00%	Sangat Tinggi
3.1.2	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	2	100,00%	Sangat Tinggi
4	Tercapainya Fasilitasi Penanganan ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan	100	Persen	50	50,00%	Sangat Rendah
4.1	Tercapainya fasilitasi Penanganan Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
4.1.1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	3	100,00%	Sangat Tinggi

4.1.2	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	Laporan	2	100,00%	Sangat Tinggi
4.2	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang terfasilitasi	100	Persen	0	0,00%	Sangat Rendah
4.2.1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	0	0,00%	Sangat Rendah
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
5.1.1	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40	Orang	40	100,00%	Sangat Tinggi
5.1.7	Meningkatnya Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2	Dokumen	2	100,00%	Sangat Tinggi
6	Tercapainya fasilitas Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
6.1	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100	Persen	100	100,00%	Sangat Tinggi
6.1.1	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	Dokumen	1	100,00%	Sangat Tinggi
6.1.2	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	1	100,00%	Sangat Tinggi

6.1.3	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	1	100,00%	Sangat Tinggi
6.1.7	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	1	100,00%	Sangat Tinggi
6.1.15	Terlaksananya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Dokumen	1	100,00%	Sangat Tinggi

Penjelasan Tabel 3.2 sebagai berikut :

Sasaran Kinerja Utama

Sasaran Kinerja Utama Kecamatan Sungai Pinang adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan Indikator kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan.

Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah instrumen penilaian yang dijadikan patokan untuk pengukuran kinerja kecamatan. Evaluasi Kinerja Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan, dimana didalamnya terdapat 7 (tujuh) aspek indikator Penilaian EKK, yaitu :

- 1. Aspek Administrasi;
- 2. Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- 3. Aspek Pelayanan Publik;
- 4. Aspek Kesejahteraan Sosial;
- 5. Aspek Ketentraman dan Ketertiban;
- 6. Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan;
- 7. Aspek Pemberdayaan Masyarakat.

Pada sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang merupakan Sasaran Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024 dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi dengan target 79 dapat terealisasi 96,67 dengan nilai capaian 125,55 % dengan predikat capaian **Sangat Tinggi**.

Commented [SP4]: SUDAH

Commented [SP5]: SUDAH

Sasaran Kinerja Sekcam

Sasaran Kinerja Sekcam yaitu terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian dengan indikator Nilai Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang.

Penilaian mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk menilai tata kelola, manajemen risiko dan kematangan sistem pengendalian intern Perangkat Daerah di Kabupaten Banjar. Peraturan Bupati tentang Penilaian Mandiri Indikator dan Kinerja Intern (IKKI) Perangkat Daerah memuat Pedoman Implementasi Penilaian Mandiri IKKI Perangkat Daerah yang memuat metodologi penilaian mandiri IKKI Perangkat Daerah, termasuk pengaturan penilaiannya, yang dapat didukung dengan aplikasi Penilaian Mandiri IKKI Perangkat Daerah/*Control Self Assesment* (CSA).

Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern diatur dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, Dimana didalamnya terdapat aspek indicator Penilaian Mandiri IKKI, yaitu :

1. Kinerja Utama;
2. Kepatuhan;
3. Kinerja Pelayanan Publik

Pada sasaran Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian yang merupakan Sasaran Sekretaris Camat Tahun 2024 dengan Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) dengan target 76 dapat terealisasi 77,32 dengan nilai capaian 101,74 % dengan predikat capaian **Sangat Tinggi**.

Commented [SP6]: SUDAH

Commented [SP7]: SUDAH

Commented [SP8]: SUDAH

Commented [SP9]: SUDAH

SASARAN KINERJA KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET

Sasaran Kinerja Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset ada 12 (Dua Belas) yaitu :

Commented [SP10]: SUDAH

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas memiliki indikator Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu dengan target pada Tahun 2024 yaitu 100 % dapat terealisasi 100 % dengan nilai capaian 100% dan capaian predikat **Sangat Tinggi**. Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :

Commented [SP11]: SUDAH

- a. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah memiliki indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target Tahun 2024 yaitu 6 dokumen dan terealisasi 6 dokumen sehingga diperoleh nilai capaian 100 % dan memperoleh predikat **Sangat Tinggi**.
- b. Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD memiliki indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan target Tahun 2024 yaitu 1 Dokumen dapat terealisasi sebanyak 1 Dokumen sehingga diperoleh nilai capaian 100 % dan memperoleh predikat **Sangat Tinggi**.
- c. Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD memiliki

- indikator Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan target Tahun 2024 yaitu 1 Dokumen dapat terealisasi sebanyak 1 Dokumen sehingga diperoleh capaian 100% dan memperoleh predikat **Sangat Tinggi**.
- d. Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD memiliki indikator Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan target Tahun 2024 yaitu 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen sehingga diperoleh capaian 100 % dan memperoleh predikat **Sangat Tinggi**.
- e. Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD memiliki indikator Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan target Tahun 2024 yaitu 1 Dokumen dapat terealisasi sebanyak 1 Dokumen sehingga diperoleh capaian 100 % dan memperoleh predikat **Sangat Tinggi**.
- f. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD memiliki indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target tahun 2024 yaitu 4 Laporan dapat terealisasi sebanyak 4 Laporan sehingga diperoleh capaian 100 % dan memperoleh predikat **Sangat Tinggi**.
- g. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target Tahun 2024 yaitu 2 laporan dan terealisasi 2 laporan sehingga diperoleh capaian 100 % dan memperoleh predikat **Sangat Tinggi**.
2. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat daerah yang berkualitas memiliki indikator Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target Tahun 2024 yaitu 100 % dapat terealisasi 100 % dan capaian

predikat **Sangat Tinggi**. Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :

- a. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN memiliki indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target Tahun 2024 yaitu 14 orang dapat terealisasi 14 orang sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
 - b. Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD memiliki indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target Tahun 2024 yaitu 12 dokumen dan terealisasi 12 dokumen sehingga diperoleh capaian 100 % dan memperoleh predikat **Sangat Tinggi**.
 - c. Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD memiliki indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD memiliki target pada Tahun 2024 yaitu 1 Laporan dapat terealisasi 1 Laporan sehingga diperoleh capaian 100 % dengan predikat **Sangat Tinggi**.
3. Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas memiliki indikator Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target pada Tahun 2024 yaitu 100 % dapat terealisasi 100 % sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**. Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :
- a. Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD memiliki indikator Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target pada Tahun 2024 yaitu 1 Laporan dapat terealisasi 1 Laporan sehingga diperoleh capaian 100 % dengan predikat **Sangat Tinggi**.
 - b. Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD memiliki indikator Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target pada Tahun 2024 yaitu 4 Laporan dapat terealisasi 4 Laporan sehingga diperoleh capaian 100 % dengan predikat **Sangat Tinggi**.

SASARAN KINERJA KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sasaran Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian ada 19 (sembilan belas) yaitu :

1. Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah memiliki indikator Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi dengan target pada Tahun 2024 yaitu 100% dapat terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**. Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :
 - a. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai memiliki indikator Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan target pada Tahun 2024 yaitu 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen sehingga diperoleh capaian 100 % dengan predikat **Sangat Tinggi**.
 - b. Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan memiliki indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target pada Tahun 2024 yaitu 1 Orang dan terealisasi 1 Orang sehingga diperoleh capaian 100 % dengan predikat **Sangat Tinggi**.
2. Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum Kantor memiliki indikator Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target Tahun 2024 yaitu 100% dapat terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**. Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :
 - a. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor memiliki indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target Tahun 2024 yaitu 5 paket dapat terealisasi 5 paket sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
 - b. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor memiliki indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target Tahun 2024 yaitu 1 paket dapat terealisasi 1 paket sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
 - c. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga memiliki indikator Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan dengan target Tahun 2024

- yaitu 10 paket dapat terealisasi 10 paket sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
- d. Tersedianya Logistik Kantor memiliki indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan target Tahun 2024 yaitu 25 paket dan telah terealisasi 25 paket sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
 - e. Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor memiliki indikator Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dengan target Tahun 2024 yaitu 3 paket dan terealisasi 3 paket sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
 - f. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD memiliki indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target Tahun 2024 yaitu 12 Laporan dapat terealisasi sebanyak 12 Laporan sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
3. Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan memiliki indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target Tahun 2024 yaitu 100% dapat terealisasi sebesar 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**. Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :
- a. Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya memiliki indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dengan target Tahun 2024 yaitu 2 unit dapat terealisasi sebanyak 2 unit sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
4. Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor memiliki indikator Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target Tahun 2024 yaitu 100% dapat terealisasi sebesar 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**. Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :
- a. Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat memiliki indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target Tahun 2024 yaitu 1 laporan dan terealisasi 1 laporan sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

- b. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik memiliki indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target Tahun 2024 yaitu 12 laporan dapat terealisasi 12 laporan sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
 - c. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor memiliki indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target Tahun 2024 yaitu 1 laporan dapat terealisasi 1 laporan sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
5. Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan memiliki indikator Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target Tahun 2024 yaitu 100% dapat terealisasi sebesar 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**. Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :
- a. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan memiliki indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target Tahun 2024 yaitu 12 unit dapat terealisasi 12 unit sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
 - b. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya memiliki indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target Tahun 2024 yaitu 1 unit dapat terealisasi 1 unit sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
 - c. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya memiliki indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi dengan target Tahun 2024 yaitu 1 Unit dapat terealisasi 1 Unit sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

SASARAN KINERJA KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Sasaran Kinerja Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial yaitu :

1. Terselenggaranya Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang memiliki indikator Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang Terlaksana dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
 - a. Tercapainya Persentase Pelayanan Paten memiliki indikator Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
 - i. Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan memiliki Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan target pada Tahun 2024 yaitu 2 laporan dengan terealisasi 2 laporan sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
 - b. Tercapainya Persentase Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial memiliki indikator Presentase Koordinasi Kgiatan Kessos Yang Dilaksanakan dengan target 100% dan terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
 - i. Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan memiliki indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan target 7 Laporan dan terealisasi 7 Laporan sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

SASARAN KINERJA KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sasaran Kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yaitu :

1. Tercapainya Persentase Pelaksanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan memiliki indikator Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dengan target Tahun 2024 yaitu

100% dan terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

- a. Tercapainya Persentase Desa dan Kelurahan yang Melaksanakan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan yang Tepat Waktu memiliki indikator Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana dengan target Tahun 2024 yaitu 100% dan terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
- a. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa memiliki indikator Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan target Tahun 2024 yaitu 11 Lembaga Kemasyarakatan dan terealisasi 11 Lembaga Kemasyarakatan sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
- b. Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan memiliki indikator Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan target Tahun 2024 yaitu 2 laporan dapat terealisasi 2 laporan sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

SASARAN KINERJA KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Sasaran Kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban yaitu :

1. Tercapainya Fasilitas Penanganan ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat memiliki indikator Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan dengan target Tahun 2024 yaitu 100 % dan terealisasi 50% sehingga diperoleh capaian 50% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
 - a. Tercapainya fasilitas Penanganan KetertibanUmum dan Perlindungan masyarakat memiliki indikator Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di

Kecamatan dengan target Tahun 2024 yaitu 100 % dan terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**. Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :

- i. Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan memiliki indikator Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan target Tahun 2024 yaitu 3 laporan dan terealisasi 3 laporan sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
- ii. Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat memiliki indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan target Tahun 2024 yaitu 2 laporan dan terealisasi 2 laporan sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
- b. Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah memiliki Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan target Tahun 2024 yaitu 100% dan terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Rendah**.
 - i. Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki indikator Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan target Tahun 2024 yaitu 1 Laporan dan terealisasi 0 Laporan dengan aktivitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda sehingga diperoleh capaian 0% dengan predikat **Sangat Rendah**.

SASARAN KINERJA KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

Sasaran Kinerja Kepala Seksi Pemerintahan yaitu :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum memiliki indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target Tahun 2024 yaitu 100 % dan terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
 - a. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah memiliki indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi dengan target Tahun 2024 yaitu 100 % dan terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
 - i. Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal memiliki indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan target Tahun 2024 yaitu 40 orang dan terealisasi 40 orang sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
 - ii. Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan memiliki indikator Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal dengan target Tahun 2024 yaitu 2 Dokumen dan terealisasi 40 orang sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

2. Tercapainya fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan memiliki indikator Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan target Tahun 2024 yaitu 100 % dan terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**. Sasaran kinerja ini didukung oleh kinerja sebagai berikut :
- a. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa memiliki indikator Persentase Jumlah Sub Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana dengan target Tahun 2024 yaitu 100 % dan terealisasi 100% sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**
 - i. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa memiliki indikator Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan target Tahun 2024 yaitu 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
 - ii. Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa memiliki indikator Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan target Tahun 2024 yaitu 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
 - iii. Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa memiliki indikator Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan target Tahun 2024 yaitu 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
 - iv. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa memiliki indikator Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dengan target Tahun 2024 yaitu 1

dokumen dan terealisasi 1 dokumen sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

- v. Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa memiliki indikator Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan target Tahun 2024 yaitu 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen sehingga diperoleh capaian 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

b. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan bagian dari kinerja strategis Kecamatan Sungai Pinang sebagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Kedua Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

6Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2024		TAHUN 2023		TAHUN 2022		KET
				REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	96,67	125,55%	83,62	119,46%	83,62	119,46%	
1	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan Umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Nilai	77,32	101,74%	63,67	87,63%	77,32	101,74%	
1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persen	100	100,00%	100	97,96%	100	100,00%	
1.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	100,00%	6	85,71%	6	100,00%	
1.1.2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	
1.1.3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	
1.1.4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	
1.1.5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	

1.1.6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	100,00%	3	100,00%			
1.1.6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen					4	100,00%	
1.1.7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	100,00%	2	100,00%			
1.1.7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen					2	100,00%	
1.2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100,00%	100	100,00%	100	100,00%	
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	100,00%	14	100,00%			
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan					12	100,00%	
1.2.3	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	100,00%	2	100,00%			
1.2.3	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan					12	100,00%	
1.2.5	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	

1.3	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	Persen	100	100,00%	100	100,00%	100	90,00%	
1.3.5	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	100,00%	4	80,00%	4	80,00%	
1.3.6	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	100,00%	1	100,00%			
1.3.6	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Orang					1	100,00%	
1.5	Tersusunnya Administrasi Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Persen	100	100,00%	53,33	53,33%	100	53,33%	
1.5.5	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	100,00%	1	100,00%			
1.5.5	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan					1	100,00%	
1.5.11	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	100,00%	-	-	1	6,67%	
1.6	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100,00%	100	100,00%	100	100,00%	
1.6.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	100,00%	5	100,00%			
1.6.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis					5	100,00%	
1.6.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	100,00%	1	100,00%			

1.6.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis					43	100,00%	
1.6.3	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	100,00%	10	100,00%			
1.6.3	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis					7	100,00%	
1.6.3	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	100,00%	10	100,00%			
1.6.4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	25	100,00%	-	-	-	-	
1.6.5	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	100,00%	3	100,00%			
1.6.5	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	bulan					12	100,00%	
1.6.9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	100,00%	12	100,00%			
1.6.9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan					12	100,00%	
1.7	Tersedianya Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	Persen	100	100,00%	100	100,00%	100	100,00%	
1.7.6	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	100,00%	2	100,00%	2	100,00%	
1.8	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100,00%	100	100,00%	100	100,00%	
1.8.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	100,00%	12	100,00%			

1.8.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan					12	100,00%	
1.8.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	100,00%	12	100,00%			
1.8.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan					12	100,00%	
1.8.4	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	100,00%	1	100,00%			
1.8.4	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	bulan					12	100,00%	
1.9	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	Persen	100	100,00%	100	100,00%	100	100,00%	
1.9.2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	
1.9.6	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	100,00%	4	100,00%			
1.9.6	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis					4	100,00%	
1.9.9	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100,00%	2	100,00%			
1.9.9	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung					2	100,00%	

2	Terselenggaranya Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang Terlaksana	Persen	100	100,00%	50	50,00%		50,00%	
2.2	Tercapainya Persentase Pelayanan Paten	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen	100	100,00%	100	100,00%			
2.2.3	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	100,00%	0	0,00%	-		
2.4	Tercapainya Persentase Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Persentase Koordinasi Kegiatan Kessos yang Dilaksanakan	Persen	100	100,00%	100	100,00%	100	100,00%	
2.4.3	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	7	100,00%	4	100,00%	6	100,00%	
3	Tercapainya Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100	100,00%	83,33	83,33%		83,33%	
3.1	Tercapainya Persentase Desa dan Kelurahan yang Melaksanakan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan yang Tepat Waktu	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	Persen	100	100,00%	100	100,00%			
3.1.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	11	100,00%	11	100,00%			
3.1.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	Kegiatan					2	100,00%	

	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
3.1.2	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	100,00%	2	100,00%			
3.1.2	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan					2	66,67%	
4	Tercapainya Fasilitas Penanganan ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan	Persen	100	50,00%	100	100,00%	100	100,00%	
4.1	Tercapainya fasilitas Penanganan KetertibanUmum dan Perlindungan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persen	100	100,00%	100	100,00%			
4.1.1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	100,00%	1	100,00%			
4.1.1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan					4	100,00%	
4.1.2	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2	100,00%	2	100,00%			

4.1.2	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kegiatan					1	100,00%	
4.2	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang terfasilitasi	Persen	0	0,00%	100	100,00%			
4.2.1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	0	0,00%	1	100,00%			
4.2.1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kegiatan					2	100,00%	
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100,00%	100	100,00%		100,00%	
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persen	100	100,00%	100	100,00%			
5.1.1	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	Orang	40	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	

		Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
5.1.7	Meningkatnya Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	2	100,00%	1	100,00%	2	100,00%	
5.1.7	Meningkatnya Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kegiatan					2	100,00%	
5.1.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan					10	100,00%	
6	Tercapainya fasilitas Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	100,00%	100	100,00%		100,00%	
6.1	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	Persen	100	100,00%	100	100,00%			
6.1.1	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	
6.1.2	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	100,00%	2	100,00%			

6.1.3	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	100,00%	1	100,00%	2	100,00%	
6.1.5	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen					1	100,00%	
6.1.6	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen					1	100,00%	
6.1.7	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	
6.1.15	Terlaksananya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	1	100,00%	1	100,00%			

Sumber : Renstra Perubahan Kedua Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2021-2026

Berdasarkan data pada tabel 3.4 di atas tentang Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Sungai Pinang menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan. Capaian indikator kinerja sasaran strategis Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan terealisasi pada tahun 2023 diperoleh nilai realisasi sebesar 83,62 dengan target sebesar 73 dan pada tahun 2022 diperoleh nilai 83,62 dengan target sebesar 70. Maka, dibandingkan dengan Tahun 2024 Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan meningkat tinggi dengan perolehan nilai sebesar 96,67 dengan target 77. Hal ini disebabkan meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Sungai Pinang.

c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA 2021-2026

Indikator kinerja sasaran Tahun 2024 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Kedua Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Kedua Renstra, untuk mengetahui kemampuan Kecamatan Sungai Pinang selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dan Target Periode Akhir adalah sebagai berikut :

7 Tabel 3. 5 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Target Periode Akhir Renstra 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	96,67	81	119,35%
1	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan Umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Nilai	77,32	78	99,13%
1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persen	100	100	100,00%
1.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100,00%
1.1.2	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	1	1	100,00%
1.1.3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen	1	1	100,00%
1.1.4	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00%
1.1.5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	1	1	100,00%
1.1.6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	100,00%
1.1.7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	100,00%
1.2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00%
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	14	100,00%
1.2.3	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100,00%
1.2.5	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100,00%
1.3	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	Persen	100	100	100,00%
1.3.5	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100,00%

1.3.6	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	100,00%
1.5	Tersusunnya Administrasi Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Persen	100	100	100,00%
1.5.5	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	2	100,00%
1.5.11	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	1	100,00%
1.6	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00%
1.6.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	100,00%
1.6.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%
1.6.3	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	10	100,00%
1.6.4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	25	25	100,00%
1.6.5	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	100,00%
1.6.9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00%
1.7	Tersedianya Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	Persen	100	100	100,00%
1.7.6	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	100,00%
1.8	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100,00%
1.8.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00%
1.8.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%
1.8.4	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00%
1.9	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	Persen	100	100	100,00%
1.9.2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12	100,00%
1.9.6	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	100,00%
1.9.9	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00%
2	Terselenggaranya Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang Terlaksana	Persen	100	100	100,00%
2.2	Tercapainya Persentase Pelayanan Paten	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen	100	100	100,00%
2.2.3	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Laporan	2	2	100,00%

	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
2.4	Tercapainya Persentase Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Persentase Koordinasi Kegiatan Kessos Yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100,00%
2.4.3	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	7	7	100,00%
3	Tercapainya Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100	100	100,00%
3.1	Tercapainya Persentase Desa dan Kelurahan yang Melaksanakan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan yang Tepat Waktu	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	Persen	100	100	100,00%
3.1.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	11	11	100,00%
3.1.2	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	2	100,00%
4	Tercapainya Fasilitasi Penanganan ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan	Persen	100	100	50,00%
4.1	Tercapainya fasilitasi Penanganan KetertibanUmum dan Perlindungan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persen	100	100	100,00%
4.1.1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	3	100,00%
4.1.2	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2	2	100,00%
4.2	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang terfasilitasi	Persen	0	100	0,00%
4.2.1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	0	2	0,00%
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100,00%
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persen	100	100	100,00%
5.1.1	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	40	40	100,00%

5.1.7	Meningkatnya Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	2	2	100,00%
6	Tercapainya fasilitas Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	100	100,00%
6.1	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	Persen	100	100	100,00%
6.1.1	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	1	100,00%
6.1.2	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	100,00%
6.1.3	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	1	100,00%
6.1.7	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	1	100,00%
6.1.15	Terlaksananya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	1	1	100,00%

Berdasarkan data pada tabel 3.4 tentang Realisasi Kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Periode Akhir Renstra menunjukkan bahwa Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Sungai Pinang dengan indikator Nilai Evaluasi Kecamatan terealisasi sebesar 96,67 telah melampaui target di akhir periode Renstra yaitu 81 dengan capaian 119,35%.

d. **PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET NASIONAL**

Merupakan capaian kinerja yang membandingkan dengan kinerja yang ditargetkan nasional, untuk mengukur keberhasilan daerah dengan standar Nasional. Tentang Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tidak bisa di sandingkan dengan Target Provinsi Dan Nasional seperti tabel di atas mengingat belum diperolehnya data yang akurat dan kredible mengenai target Provinsi maupun Nasional tersebut.

e. **ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN**

Pada Tahun 2024 berdasarkan Renstra Perubahan Kedua Tahun 2021-2026 ditetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan. Dalam Upaya pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi:

Faktor Keberhasilan Sasaran

1. Faktor Internal, Pemenuhan dan pencapaian kinerja baik anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan. Dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2023, maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA/ DPPA SKPD secara konsisten, pemenuhan data dukung yang berkualitas dan sesuai saat dilakukan penjaminan kualitas data dukung oleh tim penilai kabupaten.
2. Faktor Eksternal, Peran penting dari Masyarakat/ desa yang berperan dalam memberikan informasi dan data dukung di saat Kecamatan Sungai Pinang melakukan pengumpulan data yang diminta oleh tim penilai kabupaten. Hal ini menjadikan pelaksanaan penilaian Sasaran Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan bisa diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.
3. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja baik program, kegiatan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencapaian kinerja secara keseluruhan yang harus dilakukan agar bisa mengetahui

perkembangan pelaksanaan kinerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan solusi.

Faktor Penghambat Sasaran

Faktor penghambat tercapainya sasaran adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Sungai Pinang
2. Kualitas data dukung penilaian yang tidak sesuai kriteria tim penilai.
3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi, karena masih terdapat pegawai yang belum bisa menguasai komputer.
4. Kurang nya bangunan/ tempat gudang arsip yang menjadi salah satu poin penilaian.
5. Tidak terpasang spanduk / banner yang menunjukkan data aspirasi masyarakat yang telah disepakati pada kegiatan musrenbang Kecamatan Sungai Pinang tahun berjalan, dimana ini juga salah satu poin penilaian.
6. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pencapaian kinerja

Catatan Penting dalam Pencapaian Sasaran

1. Menambah Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.
2. Peningkatan wawasan Sumber Daya Manusia.
3. Memenuhi point point dan dukung yang kurang lengkap saat dilakukan penilaian dan evaluasi.
4. Monitoring dan evaluasi masih harus sering dilaksanakan guna pencapaian target kinerja.

Upaya Perbaikan

Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang kinerja ASN. Monitoring dan evaluasi bulanan juga diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan yang selama ini dilaksanakan di kecamatan agar sinkron antara perencanaan dan target serta ada kejelasan dalam capaian kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Tindak Lanjut yang Akan Datang

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penambahan sumber daya manusia dan peningkatan wawasan.
2. Memaksimalkan koordinasi pada intern Kecamatan Sungai Pinang, sehingga Capaian Kinerja Sasaran Renstra, Program dan Kegiatan bisa dicapai dengan lebih baik lagi.

f. ANALISA EFISIENSI

8Tabel 3. 6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI (%)
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	96,67	125,55%	84,95%	67,66%
1	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan Umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	77,32	101,74%	84,43%	82,99%
1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	100,00%	82,41%	82,41%
1.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	100,00%	99,77%	99,77%
1.1.2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	100,00%	100,00%	100,00%
1.1.3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	100,00%	100,00%	100,00%
1.1.4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	100,00%	100,00%	100,00%
1.1.5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	100,00%	100,00%	100,00%
1.1.6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	100,00%	98,82%	98,82%
1.1.7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	100,00%	22,22%	22,22%
1.2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100,00%	84,50%	84,50%
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	100,00%	84,28%	84,28%
1.2.3	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	100,00%	98,24%	98,24%

1.2.5	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	100,00%	48,47%	48,47%
1.3	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	100,00%	73,56%	73,56%
1.3.5	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	100,00%	53,64%	53,64%
1.3.6	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	100,00%	75,00%	75,00%
1.5	Tersusunnya Administrasi Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	100,00%	87,09%	87,09%
1.5.5	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	100,00%	0,00%	0,00%
1.5.11	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	100,00%	93,00%	93,00%
1.6	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100,00%	74,06%	74,06%
1.6.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	100,00%	99,67%	99,67%
1.6.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	100,00%	73,82%	73,82%
1.6.3	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	100,00%	100,00%	100,00%
1.6.4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25	100,00%	84,77%	84,77%
1.6.5	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	100,00%	76,43%	76,43%
1.6.9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	100,00%	73,07%	73,07%
1.7	Tersedianya Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100	100,00%	95,95%	95,95%
1.7.6	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	100,00%	95,95%	95,95%
1.8	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100,00%	85,55%	85,55%

1.8.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	100,00%	85,71%	85,71%
1.8.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	100,00%	59,97%	59,97%
1.8.4	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	100,00%	88,94%	88,94%
1.9	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	100	100,00%	91,62%	91,62%
1.9.2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	100,00%	95,23%	95,23%
1.9.6	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	100,00%	69,75%	69,75%
1.9.9	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	100,00%	87,59%	87,59%
2	Terselenggaranya Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang Terlaksana	100	100,00%	70,42%	70,42%
2.2	Tercapainya Persentase Pelayanan Paten	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100,00%	78,24%	78,24%
2.2.3	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	100,00%	78,24%	78,24%
2.4	Tercapainya Persentase Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Persentase Koordinasi Kegiatan Kessos Yang Dilaksanakan	100	100,00%	69,24%	69,24%
2.4.3	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7	100,00%	69,24%	69,24%
3	Tercapainya Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	100,00%	88,98%	88,98%
3.1	Tercapainya Persentase Desa dan Kelurahan yang Melaksanakan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan yang Tepat Waktu	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	100	100,00%	88,98%	88,98%

3.1.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11	100,00%	96,39%	96,39%
3.1.2	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	100,00%	87,36%	87,36%
4	Tercapainya Fasilitas Penanganan ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan	100	50,00%	75,63%	151,26%
4.1	Tercapainya fasilitas Penanganan KetertibanUmum dan Perlindungan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	100,00%	83,01%	83,01%
4.1.1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	100,00%	85,33%	85,33%
4.1.2	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	100,00%	71,80%	71,80%
4.2	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang terfasilitasi	0	0,00%	0,00%	0
4.2.1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	0,00%	0,00%	0
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100,00%	98,37%	98,37%
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	100,00%	98,37%	98,37%
5.1.1	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	40	100,00%	100,00%	100,00%

		Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
5.1.7	Meningkatnya Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2	100,00%	97,33%	97,33%
6	Tercapainya fasilitas Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	100,00%	76,36%	76,36%
6.1	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100	100,00%	76,36%	76,36%
6.1.1	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	100,00%	95,79%	95,79%
6.1.2	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	100,00%	100,00%	100,00%
6.1.3	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	100,00%	63,64%	63,64%
6.1.7	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	100,00%	99,16%	99,16%
6.1.15	Terlaksananya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	100,00%	51,35%	51,35%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja sasaran yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan secara persentase capaian kinerja mencapai

125,55% dan persentase penyerapan anggaran mencapai 84,95%. Sehingga diperoleh tingkat efisiensi sumber daya yang digunakan dan efisiensi anggaran sebesar 67,66%. Efisiensi ini diperoleh karena didukung oleh program-program yang dilaksanakan pada Kecamatan Sungai Pinang.

Banyaknya kegiatan yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik, dan lebih jauh juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

g. ANALISA PROGRAM/KEGIATAN

Dalam menunjang sasaran kinerja Program/Kegiatan ada beberapa faktor keberhasilan dan kegagalan diantaranya yaitu :

Faktor Keberhasilan

1. Ketersediaan Sumber Daya berupa anggaran yang cukup dalam melaksanakan program/kegiatan dan kualitas SDM yang mencukupi;
2. Adanya peran dari Pimpinan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan;
3. Bertambahnya sarana pendukung kinerja berupa PC/Laptop dalam menjalankan kegiatan.

Faktor Kegagalan

1. Perubahan jadwal kegiatan atau mendadaknya jadwal kegiatan yang disampaikan SKPD/Unit lain ke Kecamatan;

h. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

EVALUASI KINERJA TAHUN 2024

Berdasarkan Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024 dengan Nomor 700.1.2/71/LHE/P.Kin.As/II/ITDA tanggal 28 Juni 2024 memperoleh nilai 56.32 dengan interpretasi predikat CC (CUKUP). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen yang di evaluasi. Dari hasil evaluasi AKIP Tahun 2024, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut :

1) Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 20,48 dari nilai maksimal 30. Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar telah memuat tujuan, sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka menengah serta target tahunan. Selain kondisi tersebut, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, sebagai berikut:

- a) Camat belum merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja;
- b) Dokumen Perencanaan Kinerja Kecamatan Sungai Pinang belum sepenuhnya dipublikasikan tepat waktu;
- c) Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja Kecamatan Sungai Pinang tidak menantang dan realistis, serta belum terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya mengingat capaian kinerja tahun 2024 telah tercapai dan melebihi target tahun 2024;
- d) Rencana aksi kinerja belum dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja tidak dipantau secara berkala, sehingga belum bisa menentukan perbaikan kinerja sebelumnya;

2) Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 17,14 dari nilai maksimal 30. Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar telah menyepakati Perjanjian Kinerja sebagai ukuran kinerja secara formal dan menyusun laporan kinerja, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

- a) Camat selaku pimpinan belum sepenuhnya terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja, mengingat belum terdapat data dukung yang membuktikannya;
- b) Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;

- c) Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala dan organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
 - d) Dalam Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- 3) Pelaporan Kinerja
- Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 8,70 dari nilai maksimal 15. Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) namun masih terdapat beberapa yang perlu menjadi perhatian, yaitu :
- a) Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Pinang belum direviu secara berjenjang dan belum dipublikasikan pada website Kecamatan Sungai Pinang;
 - b) Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Pinang belum sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja yang telah diperjanjikan dan belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional;
 - c) Laporan kinerja belum menyajikan informasi kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan hambatannya.
- 4) Evaluasi Internal
- Hasil evaluasi atas Evaluasi Internal Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar memperoleh nilai sebesar 10,00 dari nilai maksimal 25. Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar telah melaksanakan Evaluasi Kinerja, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu: Evaluasi Internal yang dilakukan melalui Penilaian Mandiri AKIP belum dilakukan secara mendalam, dimana berdasarkan hasil penilaian, terdapat beberapa kelemahan yang tidak terdeteksi saat Penilaian Mandiri seperti penetapan target yang kurang menantang, kekurangan penyajian informasi dalam LKjiP, serta Reward dan punishment yang belum terlaksana dan Hasil Evaluasi Akuntabilitas kinerja tahun lalu belum meningkatkan perencanaan terhadap efektifitas dan efisiensi kinerja..

REKOMENDASI

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka direkomendasikan kepada Camat Sungai Pinang Kabupaten Banjar beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Camat selaku pimpinan satuan kerja segera merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja;
2. Melakukan publikasi terhadap seluruh dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja tepat waktu;
3. Menetapkan target kinerja dalam Perencanaan Kinerja yang dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis yang serta melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya;
4. Membuat perencanaan kinerja setiap pegawai yang menetapkan kinerja yang akan dicapai dan setiap pegawai harus memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan terutama pada kuantitas dan waktu penyelesaian yang belum tercantum pada SKP;
5. Menjadikan pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
6. Melaksanakan evaluasi internal secara berkala dan mendalam serta melaksanakan pembahasan dengan pihak yang berkepentingan yang ditugaskan dalam kesepakatan dengan pihak terkait langsung dengan temuan hasil evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi. Kesepakatan tersebut secara formal menjelaskan tentang siapa dan kapan batas Waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti.

7. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Kecamatan Sungai Pinang telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

9Tabel 3. 7 Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	WAKTU PELAKSANAAN	
1	2	3	5	
1.	Camat selaku pimpinan satuan kerja segera merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja	PK Kepala SKPD yang sudah di formalkan	22 agustus 2024	
2	Melaksanakan Publikasi terhadap seluruh Dokumen Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Tepat Waktu	SS Website SS ESR Menpan RB SS E Sakip Kab Banjar	22 agustus 2024	
3.	Menetapkan Target Kinerja Dalam Perencanaan Kinerja yang dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis yang serta melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan sebelumnya	Renstra Perubahan di tahun 2025 PK Murni 2025 Renja 2025	22 agustus 2024	
4.	Membuat Perencanaan Kinerja Setiap Pegawai yang menetapkan kinerja yang akan di capai dan setiap pegawai harus mamahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan terutama pada kuantitas dan wktu penyelesaian yang belum tercantum dalam SKP	Dan Rapat Monev Kinerja	22 agustus 2024	
5.	Menjadikan Pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian	Reward dan Punishment	22 agustus 2024	

	strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien		
6.	Melaksanakan evaluasi internal secara berkala dan mendalam serta melaksanakan pembahasan dengan pihak yang berkepentingan yang ditugaskan dalam kesepakatan dengan pihak terkait langsung dengan temuan hasil evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi. kesepakatan tersebut secara formal menjelaskan tentang siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti	Rapat evaluasi dan Monitoring	22 agustus 2024

LAPORAN TINDAK LANJUT

- Menyusun Perencanaan Kinerja berupa Rencana Aksi yang menggambarkan Perencanaan Aktivitas Staf yang mendukung kinerja serta Rencana Aksi merupakan penjabaran dari Perjanjian Kinerja;
 - Telah dilakukan pembahasan di rapat evaluasi internal bersama Tim AKIP untuk penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahun 2025, akan dibuat penyesuaian rencana aksi sampai level staf
- Menyusun dan Menetapkan SOP Pengukuran Kinerja yang memuat mekanisme yang jelas proses pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;
 - SOP pengumpulan kinerja proses sedang dalam proses penetapan
- Membuat data kinerja yang memuat target triwulanan untuk mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
 - Telah dilaksanakan pada penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II dan triwulan III Tahun 2024
- Melakukan pemantauan capaian kinerja sampai pada jenjang operasional staf/pelaksana;
 - Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi per triwulan untuk Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan sampai triwulan III

5. Menyusun LKJiP secara lengkap dengan menyajikan informasi capaian kinerja yang telah diperjanjikan, memuat dan menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian kinerja outcome/output penting, menyajikan data perbandingan yang lengkap serta menyajikan data kinerja yang andal;
 - Akan dilakukan perbaikan penyusunan LKJiP Tahun 2024
6. Melaksanakan evaluasi internal secara berkala dan mendalam serta melaksanakan pembahasan dengan pihak yang berkepentingan serta memuat kesepakatan dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan temuan hasil evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi. Kesepakatan tersebut secara formal menjelaskan tentang siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti;
 - Telah dilaksanakan evaluasi internal

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan anggaran yang dikelola Kecamatan Sungai Pinang tahun 2024 adalah sebesar Rp **2.631.828.048,00,-** dengan realisasi anggaran Rp. **2.235.734.954,00,- (84,95%)** dengan rincian untuk Belanja Operasi dengan anggaran sebesar Rp. **2.593.714.048,00,-** dengan realisasi belanja sebesar Rp. **2.199.166.454,00,- (84,79%)** dan Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp. **38.114.000,00,-** dengan realisasi sebesar Rp **36.568.500,00,- (95,95%)**.

10Tabel 3. 8 Realisasi Jenis Belanja

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	6	7
5	BELANJA DAERAH	2.631.828.048,00	2.235.734.954,00	84,95
5.1	BELANJA OPERASI	2.593.714.048,00	2.199.166.454,00	84,79
5.1.1	Belanja Pegawai	1.851.346.128,00	1.563.891.078,00	84,47
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	742.367.920,00	635.275.376,00	85,57
5.2	BELANJA MODAL	38.114.000,00	36.568.500,00	95,95
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.114.000,00	36.568.500,00	95,95
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	100

Adapun untuk realiasi anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disajikan pada tabel 3.8 berikut:

11 Tabel 3. 9 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Sungai Pinang

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	2.631.828.048,00	2.235.734.954,00	84,95%
1	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan Umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	2.344.008.048,00	1.978.976.704,00	84,43%
1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	4.039.600,00	3.329.000,00	82,41%
1.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	354.800,00	354.000,00	99,77%
1.1.2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000,00	500.000,00	100,00%
1.1.3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	120.000,00	120.000,00	100,00%
1.1.4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	500.000,00	500.000,00	100,00%
1.1.5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	835.000,00	835.000,00	100,00%
1.1.6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	829.800,00	820.000,00	98,82%
1.1.7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	900.000,00	200.000,00	22,22%
1.2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.843.220.928,00	1.557.565.078,00	84,50%
1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.811.216.128,00	1.526.558.578,00	84,28%
1.2.3	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.130.000,00	30.582.500,00	98,24%
1.2.5	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	874.800,00	424.000,00	48,47%

1.3	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	9.648.800,00	7.098.000,00	73,56%
1.3.5	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	648.800,00	348.000,00	53,64%
1.3.6	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.000.000,00	6.750.000,00	75,00%
1.5	Tersusunnya Administrasi Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	10.770.000,00	9.380.000,00	87,09%
1.5.5	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	770.000,00	0,00	0,00%
1.5.11	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	9.380.000,00	93,80%
1.6	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.175.800,00	102.337.279,00	74,06%
1.6.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	749.500,00	747.000,00	99,67%
1.6.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11.750.000,00	8.673.400,00	73,82%
1.6.3	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.163.000,00	2.163.000,00	100,00%
1.6.4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3.500.000,00	2.967.000,00	84,77%
1.6.5	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.763.300,00	2.112.000,00	76,43%
1.6.9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.250.000,00	85.674.879,00	73,07%
1.7	Tersedianya Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	38.114.000,00	36.568.500,00	95,95%
1.7.6	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38.114.000,00	36.568.500,00	95,95%
1.8	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	201.028.920,00	171.987.538,00	85,55%
1.8.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.750.000,00	1.500.000,00	85,71%
1.8.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	23.318.920,00	13.984.044,00	59,97%
1.8.4	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	175.960.000,00	156.503.494,00	88,94%
1.9	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	99.010.000,00	90.711.309,00	91,62%

1.9.2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70.980.000,00	67.596.434,00	95,23%
1.9.6	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8.050.000,00	5.614.875,00	69,75%
1.9.9	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19.980.000,00	17.500.000,00	87,59%
2	Terselenggaranya Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang Terlaksana	26.704.400,00	18.806.000,00	70,42%
2.2	Tercapainya Persentase Pelayanan Paten	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.503.400,00	2.741.000,00	78,24%
2.2.3	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.503.400,00	2.741.000,00	78,24%
2.4	Tercapainya Persentase Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Persentase Koordinasi Kegiatan Kessos Yang Dilaksanakan	23.201.000,00	16.065.000,00	69,24%
2.4.3	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	23.201.000,00	16.065.000,00	69,24%
3	Tercapainya Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	44.723.500,00	39.797.000,00	88,98%
3.1	Tercapainya Persentase Desa dan Kelurahan yang Melaksanakan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan yang Tepat Waktu	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	44.723.500,00	39.797.000,00	88,98%
3.1.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.038.500,00	7.748.000,00	96,39%
3.1.2	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.685.000,00	32.049.000,00	87,36%
4	Tercapainya Fasilitas Penanganan ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan	53.654.900,00	40.579.250,00	75,63%
4.1	Tercapainya fasilitas Penanganan KetertibanUmum dan Perlindungan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum di Kecamatan	48.881.900,00	40.579.250,00	83,01%
4.1.1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	40.524.900,00	34.579.250,00	85,33%

		Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
4.1.2	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8.357.000,00	6.000.000,00	71,80%
4.2	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang terfasilitasi	4.773.000,00	0,00	0,00%
4.2.1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.773.000,00	0,00	0,00%
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	151.339.500,00	148.873.000,00	98,37%
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	151.339.500,00	148.873.000,00	98,37%
5.1.1	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	59.128.500,00	59.128.000,00	100,00%
5.1.7	Meningkatnya Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	92.211.000,00	89.745.000,00	97,33%
6	Tercapainya fasilitas Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	11.397.700,00	8.703.000,00	76,36%
6.1	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	11.397.700,00	8.703.000,00	76,36%
6.1.1	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.900.000,00	1.820.000,00	95,79%
6.1.2	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.848.000,00	1.848.000,00	100,00%

6.1.3	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.200.000,00	1.400.000,00	63,64%
6.1.7	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.749.700,00	1.735.000,00	99,16%
6.1.15	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.700.000,00	1.900.000,00	51,35%

Sumber : Laporan Realiasi Anggaran Aplikasi SIPD SILANGKAR Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024

Penjelasan Tabel 3.9 sebagai berikut:

Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang merupakan Sasaran Utama Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024 dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi dengan target 77 dapat terealisasi 96,67 dengan nilai capaian 125,55% yang didukung dengan target anggaran sebesar Rp 2.631.828.048,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.235.734.954,- dengan Persentase capaian 84,95%.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 2.344.008.048,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.978.976.704,- dan Persentase capaian 84,43%. Program ini didukung dengan 8 (delapan) kegiatan yaitu :

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu anggaran kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 4.039.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.329.000,- dan Persentase capaian 82,41%. Dengan 7 (Tujuh) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 354.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 354.000,- dan persentase capaian 99,77%.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan pagu anggaran Rp 500.000,- dan realisasi sebesar Rp 500.000,- dan persentase capaian 100%
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 120.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 120.000,- dan Persentase capaian 100%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 500.000,- dan Persentase capaian 100%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 835.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 835.000,- dan Persentase capaian 100%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp 829.800,- dan realiasi Rp 820.000,- dan persentase capaian 98,82%.
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 900.000,- dan realiasi Rp 200.000,- dan persentase capaian 22,22%.

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pagu anggaran kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.843.220.928,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.843.220.928,- dan Persentase capaian 84,50%. Dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.811.216.128,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.526.558.578,- dan Persentase capaian 84,28%.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 31.130.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.582.500,- dan Persentase capaian 98,24%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp 874.800,- dan terealisasi Rp 424.000,- dan persentase capaian sebesar 48,47%.

1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Pagu anggaran kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar Rp. 9.648.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.098.000,- dan Persentase capaian 73,56%. Dengan 2 (Dua) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 648.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 348.000,- dan Persentase capaian 53,64%.
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.750.000,- dan Persentase capaian 75%.

1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pagu anggaran kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp. 10.770.000,- dengan realisasi keuangan sebesar sebesar Rp. 9.380.000,- (87,09%) dan Persentase capaian 100%. Dengan 2 (Dua) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 770.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- dan Persentase capaian 0,00%.
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.380.000,- dan Persentase capaian 93,80%.

1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pagu anggaran kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 138.175.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 102.337.279,- dan Persentase capaian 74,06%. Dengan 6 (Enam) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 749.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 747.000,- dan Persentase capaian 99,67%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 11.750.000,- telah terealisasi sebesar Rp 8.673.400 dan persentase capaian 73,82%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.163.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.163.000,- dan Persentase capaian 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.967.000,- dan Persentase capaian 84,77%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran Rp 2.763.300,- telah terealisasi Rp 2.112.000,- dan persentase capaian 76,43%.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp 117.250.000,- telah terealisasi Rp 85.674.879,- dan persentase capaian 73,07%.

1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pagu anggaran kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 38.114.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.568.500,- dan Persentase capaian 95,95%. Dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38.114.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.568.500,- dan Persentase capaian 95,95%.

1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 201.028.920,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 171.987.538,- dan Persentase capaian 85,55%. Dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.750.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.500.000,- dan Persentase capaian 85,71%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp 23.318.920,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 13.984.044,- dan Persentase capaian 59,97%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 175.960.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 156.503.494,- dan Persentase capaian 88,94%.

1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu anggaran kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 99.010.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 90.711.309,- dan Persentase capaian 91,62%. Dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 70.980.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 67.596.434,- dan Persentase capaian 95,23 %.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.050.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.614.875,- dan Persentase capaian 69,75%.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.980.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.500.000,- dan Persentase capaian 87,59%.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pagu anggaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 26.704.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.806.000,- dan Persentase capaian 70,42%. Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Pagu anggaran kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan sebesar Rp. 3.503.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.741.000,- dan Persentase capaian 78,24%. Dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.503.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.741.000,- dan Persentase capaian 78,24%.

2.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Pagu anggaran kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sebesar Rp. 23.201.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.065.000,- dan Persentase capaian 69,24%. Dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 23.201.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.065.000,- dan Persentase capaian 69,24%.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Pagu anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar Rp. 44.723.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.797.000,- dan Persentase capaian 88,98%. Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

3.1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pagu anggaran kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebesar Rp. 44.723.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.797.000,- dan Persentase capaian 88,98%. Dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.038.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.748.000,- dan Persentase capaian 96,39%.

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.685.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 32.049.000,- dan Persentase capaian 87,36%.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pagu anggaran Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 53.654.900,- dengan realisasi keuangan Rp. 40.579.250,- dan Persentase capaian 75,63%. Program ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :

4.1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pagu anggaran kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 48.881.900,- dengan realisasi keuangan Rp. 40.579.250,- dan Persentase capaian 83,01%. Dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan pagu anggaran Rp 40.524.900,- telah terealisasi Rp 34.579.250,- dan persentase capaian 85,33%.
- Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp 8.357.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 6.000.000,- dan Persentase capaian 71,80%.

4.2 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pagu anggaran kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.773.000,- dengan realisasi keuangan Rp 0,- dan persentase capaian 0,00%. Dengan 1 (Satu) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan

pagu anggaran Rp 4.773.000,- telah terealisasi Rp 0,- dan persentase capaian 0,00%.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pagu anggaran Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 151.339.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 148.873.000,- dan Persentase capaian 98,37%. Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

5.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Pagu anggaran kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah sebesar Rp 151.339.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 148.873.000,- dan Persentase capaian 98,37%. Dengan 2 (Dua) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pagu anggaran sebesar Rp. 59.128.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 59.128.500,- dan Persentase capaian 100%.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 92.211.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 89.745.000,- dan Persentase capaian 97,33%.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Pagu anggaran Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa sebesar Rp. 11.397.700,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.703.000,- dan Persentase capaian 76,36%. Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

6.1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pagu anggaran kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp.

11.397.700,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.703.000,- dan Persentase capaian 76,36%. Dengan 5 (Lima) sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.900.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.820.000,- dan Persentase capaian 95,79%.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.848.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.848.000,- dan Persentase capaian 100%.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.200.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.400.000,- dan Persentase capaian 63,64%.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.749.700,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.735.000,- dan Persentase capaian 99,16%.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.700.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.900.000,- dan Persentase capaian 51,35%.

12Tabel 3. 10 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	77	96,67	125,55%	2.631.828.048,00	2.235.734.954,00	84,95%
1	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan Umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	76	77,32	101,74%	2.344.008.048,00	1.978.976.704,00	84,43%
1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	100	100,00%	4.039.600,00	3.329.000,00	82,41%
1.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	100,00%	354.800,00	354.000,00	99,77%
1.1.2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100,00%	500.000,00	500.000,00	100,00%
1.1.3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100,00%	120.000,00	120.000,00	100,00%
1.1.4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100,00%	500.000,00	500.000,00	100,00%
1.1.5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100,00%	835.000,00	835.000,00	100,00%
1.1.6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	100,00%	829.800,00	820.000,00	98,82%
1.1.7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	100,00%	900.000,00	200.000,00	22,22%
1.2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100,00%	1.843.220.928,00	1.557.565.078,00	84,50%

1.2.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	100,00%	1.811.216.128,00	1.526.558.578,00	84,28%
1.2.3	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100,00%	31.130.000,00	30.582.500,00	98,24%
1.2.5	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100,00%	874.800,00	424.000,00	48,47%
1.3	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	100	100,00%	9.648.800,00	7.098.000,00	73,56%
1.3.5	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100,00%	648.800,00	348.000,00	53,64%
1.3.6	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	100,00%	9.000.000,00	6.750.000,00	75,00%
1.5	Tersusunnya Administrasi Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	100	100,00%	10.770.000,00	9.380.000,00	87,09%
1.5.5	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	2	100,00%	770.000,00	0,00	0,00%
1.5.11	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	1	100,00%	10.000.000,00	9.380.000,00	93,80%
1.6	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100,00%	138.175.800,00	102.337.279,00	74,06%
1.6.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5	100,00%	749.500,00	747.000,00	99,67%
1.6.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100,00%	11.750.000,00	8.673.400,00	73,82%
1.6.3	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	10	100,00%	2.163.000,00	2.163.000,00	100,00%
1.6.4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25	25	100,00%	3.500.000,00	2.967.000,00	84,77%
1.6.5	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	100,00%	2.763.300,00	2.112.000,00	76,43%
1.6.9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100,00%	117.250.000,00	85.674.879,00	73,07%
1.7	Tersedianya Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100	100	100,00%	38.114.000,00	36.568.500,00	95,95%
1.7.6	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2	100,00%	38.114.000,00	36.568.500,00	95,95%

1.8	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100,00%	201.028.920,00	171.987.538,00	85,55%
1.8.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	100,00%	1.750.000,00	1.500.000,00	85,71%
1.8.2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100,00%	23.318.920,00	13.984.044,00	59,97%
1.8.4	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	100,00%	175.960.000,00	156.503.494,00	88,94%
1.9	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	100	100	100,00%	99.010.000,00	90.711.309,00	91,62%
1.9.2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	12	100,00%	70.980.000,00	67.596.434,00	95,23%
1.9.6	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	1	100,00%	8.050.000,00	5.614.875,00	69,75%
1.9.9	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100,00%	19.980.000,00	17.500.000,00	87,59%
2	Terselenggaranya Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang	Persentase Fasilitas Kewenangan Perlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang Terlaksana	100	100	100,00%	26.704.400,00	18.806.000,00	70,42%
2.2	Tercapainya Persentase Pelayanan Paten	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100,00%	3.503.400,00	2.741.000,00	78,24%
2.2.3	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	2	100,00%	3.503.400,00	2.741.000,00	78,24%
2.4	Tercapainya Persentase Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Persentase Koordinasi Kegiatan Kessos yang Dilaksanakan	100	100	100,00%	23.201.000,00	16.065.000,00	69,24%
2.4.3	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7	7	100,00%	23.201.000,00	16.065.000,00	69,24%
3	Tercapainya Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	100	100,00%	44.723.500,00	39.797.000,00	88,98%
3.1	Tercapainya Persentase Desa dan Kelurahan yang Melaksanakan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan yang Tepat Waktu	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	100	100	100,00%	44.723.500,00	39.797.000,00	88,98%

3.1.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11	11	100,00%	8.038.500,00	7.748.000,00	96,39%
3.1.2	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	2	100,00%	36.685.000,00	32.049.000,00	87,36%
4	Tercapainya Fasilitas Penanganan ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan	100	100	50,00%	53.654.900,00	40.579.250,00	75,63%
4.1	Tercapainya fasilitas Penanganan KetertibanUmum dan Perlindungan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	100	100,00%	48.881.900,00	40.579.250,00	83,01%
4.1.1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	3	100,00%	40.524.900,00	34.579.250,00	85,33%
4.1.2	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	2	100,00%	8.357.000,00	6.000.000,00	71,80%
4.2	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang terfasilitasi	100	0	0,00%	4.773.000,00	0,00	0,00%
4.2.1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	0	0,00%	4.773.000,00	0,00	0,00%
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100,00%	151.339.500,00	148.873.000,00	98,37%
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	100	100,00%	151.339.500,00	148.873.000,00	98,37%
5.1.1	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	40	40	100,00%	59.128.500,00	59.128.000,00	100,00%

		Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
5.1.7	Meningkatnya Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2	2	100,00%	92.211.000,00	89.745.000,00	97,33%
6	Tercapainya fasilitas Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	100	100,00%	11.397.700,00	8.703.000,00	76,36%
6.1	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100	100	100,00%	11.397.700,00	8.703.000,00	76,36%
6.1.1	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	1	100,00%	1.900.000,00	1.820.000,00	95,79%
6.1.2	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	1	100,00%	1.848.000,00	1.848.000,00	100,00%
6.1.3	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	1	100,00%	2.200.000,00	1.400.000,00	63,64%
6.1.7	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	1	1	100,00%	1.749.700,00	1.735.000,00	99,16%
6.1.15	Terlaksananya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	1	100,00%	3.700.000,00	1.900.000,00	51,35%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024, merupakan bentuk pengawasan dan pertanggung jawaban pencapaian kinerja Tahun 2024, yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan LKJIP ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2024 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan Kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024, sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Kecamatan dengan target Tahun 2024 sebesar 77 dengan realisasi sebesar 96,67 dan perolehan capaian sebesar 125,55%, dengan predikat Sangat Tinggi. Pencapaian keberhasilan sasaran strategis ini di dukung oleh indikator program lain sebagai berikut:

1. Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI);
2. Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana;
3. Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
4. Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan;
5. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
6. Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

B. SARAN-SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Pembahasan di tingkat yang lebih tinggi tentang program dan kegiatan yang selama ini dilaksanakan di Kecamatan Sungai Pinang agar sinkron antara perencanaan dan keuangan agar adanya kejelasan dalam capaian kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

2. Perlunya peningkatan wawasan dan pendampingan yang rutin oleh instansi mitra pemangku terhadap aparatur kecamatan khususnya dalam penyusunan Dokumen Perencanaan guna peningkatan nilai SAKIP.
3. Pelaksanaan Koordinasi yang lebih intens lagi baik itu pada internal kecamatan Sungai Pinang maupun dengan pihak diluar Kecamatan Sungai Pinang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sungai Pinang ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Sungai Pinang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2024 dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam Pencapaian target- target perencanaan pada tahun berikutnya.

LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja dan Cascading Tahun 2024
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024